JADI SYARAT WAJIB BEPERGIAN HINGGA ANGKRINGAN

DIY Perluas Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi

YOGYA (KR) - Pemda DIY menyiapkan strategi perluasan penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Selain diterapkan menjadi syarat wajib bepergian maupun berkunjung ke tempat-tempat umum dan mal, juga akan diperluas dengan menerapkan di objek wisata, restoran, sekolah, warung makan, maupun angkringan.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Drs K Baskara Aji, Minggu (5/9) mengemukakan, aplikasi PeduliLindungi diharapkan bisa sebagai alat skrining untuk memastikan masyarakat yang bepergian telah tervaksin, setidaknya dosis pertama.

"Memang untuk tahap awal, aplikasi PeduliLindungi baru dimanfaatkan di mal atau sejumlah moda transportasi. Namun dalam waktu dekat aplikasi ini akan dimanfaatkan disejumlah fasilitas publik seperti destinasi wisata sampai rumah makan bahkan angkringan. Dengan adanya aplikasi ini, selain memudahkan skrining, kami ingin memastikan masyarakat yang bepergian telah tervaksin setidaknya dosis pertama," kata Sekda, Minggu (5/9).

Menurut Baskara Aji, saat ini pihaknya masih menunggu pengiriman QR code aplikasi PeduliLindungi dari pemerintah pusat. Nantinya QR code tersebut akan disebar di tempat-tempat umum sehingga bisa memudahkan pengawasan terhadp para pengunjung.

Selain untuk beberapa hal di atas, keberadaan aplikasi PeduliLindungi juga dapat mempermudah instansi pemerintah untuk melakukan tracing kontak kasus positif jika ditemui penularan Covid-19. Hal itu dikarenakan, riwayat perjalanan masyarakat akan terekam dalam aplikasi PeduliLindungi saat penggunanya melakukan pemindaian QR code di suatu lokasi.

"Kalau kita scan dan hasilnya merah, nanti orang orang yang datang dan berada dilokasi atau koordinat yang sama akan diberitahu bahwa mereka baru saja ketemu orang yang merah (positif Covid-19). Dengan begitu mereka bisa melakukan antisipasi lebih awal,"ungkap Baskara Aji.

Baskara Aji mengungkapkan, walaupun destinasi wisata di DIY belum buka sebagai dampak dari adanya kebijakan PPKM level 4. Namun pihaknya meminta kepada Dinas Pariwisata maupun pihak terkait lainnya untuk berkoordinasi dengan Kemenkes supaya bisa dikeluarkan QR code untuk masing-masing destinasi wisata. Karena nantinya QR code untuk destinasi satu dengan lainnya bedabeda. Dengan begitu, saat pemerintah memutuskan destinasi pariwisata sudah diperbolehkan untuk dibuka semuanya sudah benarbenar siap. **(Ria)-f**

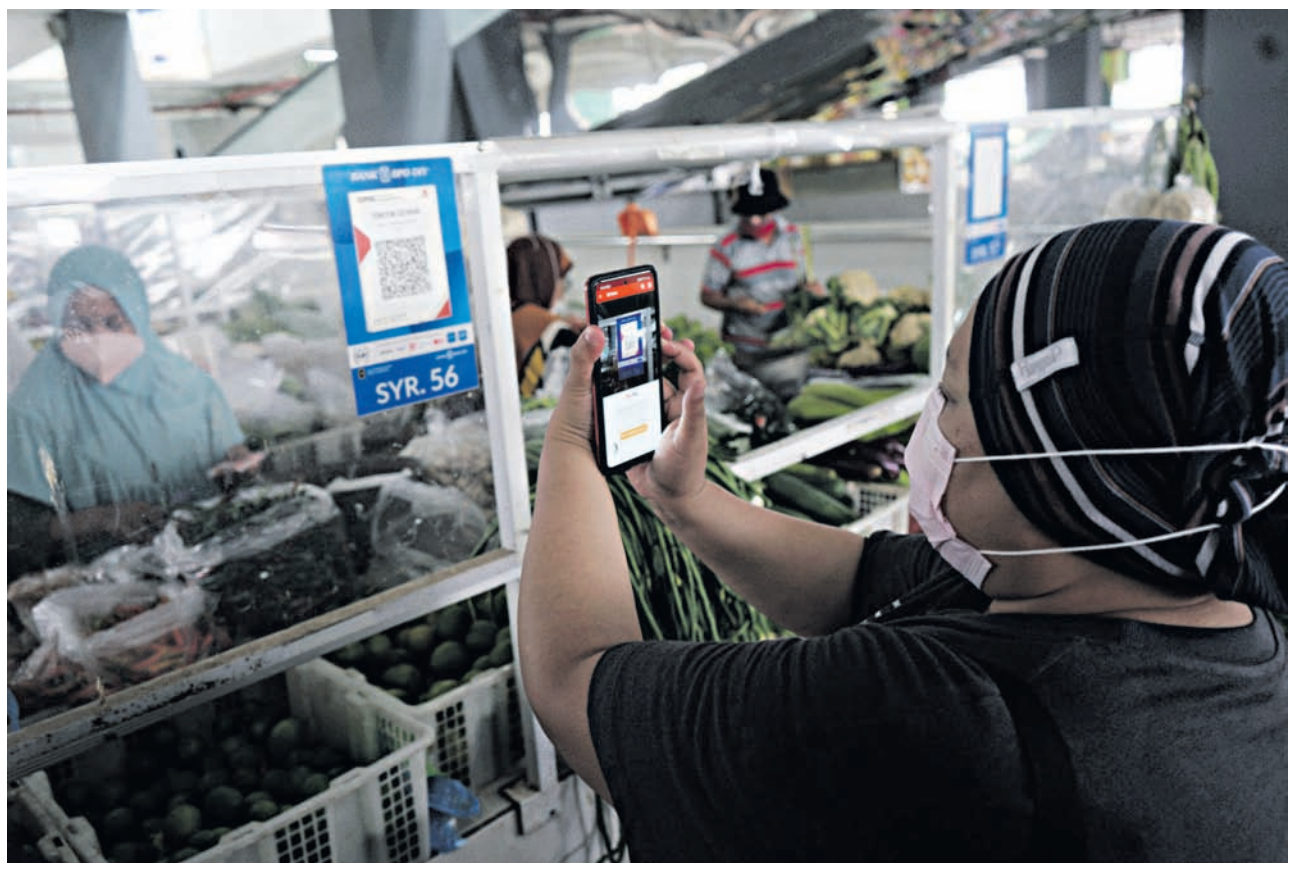

KR-Antara/Andreas Fitri Atmoko

***NONTUNAI DI PASAR TRADISIONAL:** Warga melakukan transaksi menggunakan metode bayar scan QRIS dengan aplikasi DOKU e-Wallet di Pasar Tradisional Prawirotaman, Yogyakarta, Minggu (5/9). Pemkot Yogyakarta menggencarkan transaksi nontunai di pasar tradisional seperti di Pasar Prawirotaman maupun Pasar Beringharjo.*

KEPATUHAN JAGA PROKES MENINGKAT

Penting, Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat

YOGYA (KR) - Penanganan Covid-19 tidak akan optimal jika hanya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah. Karena ketepatan dan kecepatan penanganan berperan penting dalam menekan jumlah kasus konfirmasi positif. Namun ketepatan dan kecepatan penanganan itu dapat dilakukan jika ada peningkatan kesadaran dan pemahaman pula di kalangan masyarakat. Untuk itu, edukasi perlu terus dilakukan.

"Meski kasus harian di DIY mulai menurun, namun jika dibandingkan daerah lain, angka kematian di DIY masih tergolong cukup tinggi. Kondisi ini membutuhkan perhatian semua pihak. Kecepatan dan ketepatan penanganan Covid-19 diharapkan bisa menekan kasus kematian," kata epidemiologi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Bayu Satria Wiratama di Yogyakarta, Minggu (5/9).

Bayu mengatakan, upaya yang bisa dilakukan antara lain penanganan secara lebih responsif, cepat dan tepat, serta meningkatkan kesadaran warga kalau mereka ada menderita penyakit diabetes, gagal ginjal kronis, hipertensi, dan lain-lain harus rutin kontrol, lebih menjaga diri dengan 5M dan vaksinasi. Apabila muncul keluhan dan mengarah gejala Covid-19, segera periksakan diri agar tidak terlambat. "Karena selama ini banyak pasien terlambat melakukan pemeriksaan ke RS sehingga tidak bisa ditangani optimal. Padahal jika sejak awal mereka mau memeriksakan diri, kemungkinan atau peluang untuk sembuh akan lebih besar," ujarnya.

Juru Bicara Pemda DIY untuk Penanganan Covid-19 Berty Murtiningsih melaporkan, per Minggu (5/9) kasus konfirmasi positif harian di DIY tambah 260 kasus menjadi 150.664. Pasien sembuh bertambah cukup signifikan 981 sehingga menjadi 138.103. Sementara kasus pasien meninggal bertambah 21 menjadi 4.969 kasus.

Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Sonny Harry B Harmadi di Jakarta mengungkapkan, data Satgas Perubahan Perilaku sejak penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat 3 Juli 2021 menunjukkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan (prokes) 3M secara konsisten terus meningkat secara nasional.

Dengan skala 1-10, skor kepatuhan memakai masker meningkat dari 7,72 pada periode 3-17 Juli 2021 menjadi 7,88 di 20 Agustus-3 September 2021. Skor kepatuhan menjaga jarak juga meningkat dari 7,53 (3-17 Juli 2021) menjadi 7,75 (20 Agustus-3 September 2021). Sedangkan skor kepatuhan mencuci tangan meningkat dari 7,64 (3-17 Juli 2021) menjadi 7,86 (20 Agustus-3 September 2021).

Menurut Sonny, untuk mendorong peningkatan kepatuhan melaksanakan prokes, Satgas Penanganan Covid-19 menerapkan sejumlah strategi utama. Antara lain dengan kampanye masif dan membangun komunikasi risiko pentingnya prokes 3M melalui berbagai media. "Kampanye menjangkau berbagai kelompok masyarakat, termasuk materi edukasi berbasis seni budaya seperti wayang kulit, wayang golek, kesenian Minang, syair Melayu, dan sebagainya. Juga melalui lagu, komik, video, dan lain-lain," kata Sonny.

Selain itu, melalui penggerakan lapangan oleh para Duta Perubahan Perilaku (DPP). Sejak 7 September 2020, jumlah DPP mencapai 116.550 orang yang tersebar di 34 provinsi dan 429 kabupaten/kota. **(Ria/Ira/San)-f**

RUMAH SAKIT MULAI TUTUP BANGSAL COVID-19

IDI DIY Gencarkan Vaksinasi

YOGYA (KR) - Sejumlah rumah sakit besar dan kecil di DIY sudah mulai menutup bangsal untuk pasien Covid-19. Langkah tersebut dilakukan setelah melandainya kasus positif Covid-19.

Demikian dikemukakan Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) DIY, dr Tri Wijaya kepada *KR*, Minggu (5/9) menanggapi penurunan kasus positif Covid-19 di DIY. "Bangsal tersebut kini banyak yang telah berganti bangsal untuk umum," ujarnya.

Namun demikian, dr Tri Wijaya mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap waspada, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Langkah ini harus dilakukan agar tidak muncul lagi ledakan kasus Covid-19 di masa mendatang. Karena itu, dirinya mengimbau agar masyarakat tidak lengah. Semua pihak hendaknya tetap menjaga diri agar tidak mudah tertular virus berbahaya tersebut.

Agar menekan penyebaran Covid-19, IDI DIY berusaha ikut mendorong peningkaan warga yang divaksin. Sehingga target warga yang ikut vaksinasi bisa lebih banyak.

Sejauh ini, banyak pihak yang ikut membantu dalam upaya terselenggaranya vaksinasi di masyarakat. Selain dilakukan oleh Puskesmas, juga dilakukan oleh TNI/Polri dan institusi lainnya. Disamping juga aktivitas masyarakat yang ikut membantu.

Karena itu, jika ada organisasi yang ingin ikut membantu, maka dipersilakan. Karena keberadaan komunitas, organisasi atau institusi sangat membantu.

Seiring dengan gencarnya keinginan belajar tatap muka, pihaknya juga mendorong keikutsertaan masyarakat. Khususnya membantu sekolah untuk ikut menggelar kegiatan vaksinasi pada siswanya. **(Jon)-f**

DIWARNAI KARTU MERAH

Keberuntungan Naungi Arema FC

BOGOR (KR)- Keberuntungan menaungi Arema FC saat menghadapi PSM Makassar di laga pertamanya pada Liga 1 2021-2022, Minggu (5/9) tadi malam. Arema yang harus bermain dengan 10 pemain sejak menit keempat, menahan PSM Makassar dengan skor 1-1.

Berlangsung di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, petaka menghampiri Arema FC sejak pertandingan berjalan empat menit. Jayus Hariono diusir keluar wasit asal Margokaton, Seyegan, Sleman, Agus Fauzan Arifin.

Jayus mendapatkan kartu merah menyusul pelanggaran kerasnya pada Sutanto Tan. Unggul dalam jumlah pemain, PSM mendominasi pertandingan. Peluang didapat PSM melalui Wiljan Pluim menit kesembilan, namun sepakan keras Pluim dari luar kotak penalti digagalkan penjaga gawang asing Arema, Adilson.

Selang dua menit, PSM kembali mendapat peluang. Tapi lagi-lagi, Adilson tampil apik. Kali ini, ia mampu menahan tendangan bebas Anco Jansen yang mengarahkan ke sudut kiri bawah gawangnya. Singo Edan pantang mundur meski hanya bermain dengan 10 pemain.

Buktinya Arema FC mampu unggul duluan menit 19 lewat eksekusi penalti Hanif Sjahbandi. Penalti diberikan wasit setelah penjaga gawang PSM, Hilmansyah membuat pelanggaran pada KH Yudo saat berusaha melewatinya di dalam kotak penalti. Arema unggul 1-0.

Tapi, keunggulan Arema tak berselang lama. Hanya dua menit, PSM mampu menyamakan skor menjadi 1-1. Memanfaatkan umpan sundulan Sutanto Tan, Ilham Udin menjebol jala Adilson. Skor imbang, kedua tim saling jual beli serangan.

PSM membuat peluang unggul menit 32. Menerima umpan dari Pluim, Ilham Udin mendorong bola ke dalam kotak penalti diteruskan dengan tembakan keras mendatar. Namun, Adilson mampu menepis bola dengan kaki. Skor 1-1 bertahan hingga turun minum. **(Yud)-f**

TERMASUK TINGKATKAN KESEJAHTERAAN

DIY Jangan Sampai Lupa Tujuan Keistimewaan

YOGYA (KR) - Amanat 5 September 1945 berisi pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan KGPAA Paku Alam VIII yang menyatakan bahwa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman bergabung menjadi bagian dari Republik Indonesia. Pernyataan politik tersebut kemudian diakomodasi menjadi sebuah produk hukum yaitu Undang-Undang Keistimewaan (UUK) Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menurut Sejarawan Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr Sri Margana, sebagai sebuah produk hukum, maka UUK harus dijalankan dengan baik oleh subjek yang diberi hukum yaitu Provinsi DIY, dalam hal ini Pemimpin DIY. Dan jika ternyata dalam pelaksanaan UUK tidak berjalan dengan baik, seperti terjadi penyelewengan atau tidak mencerminkan amanat rakyat atau amanat UUK itu sendiri maka, produk hukum (UUK) bisa dievaluasi.

"Walaupun tidak sampai diamandemen, tapi sebagai produk hukum bisa dievaluasi pelaksanaannya," kata Sri Margana dalam acara Rembag Kaistimewan bertajuk 'Amanat 5 September 1945'. Diskusi diselenggarakan oleh Paniradya Kaistimewan di Pendopo Museum Sonobudoyo Yogyakarta, Minggu (5/9) dan disiarkan live streaming di Channel YouTube Paniradya Kaistimewan.

Rembag Kaistimewan menghadirkan narasumber lain, yaitu Kolumnis Keistimewaan DIY Dr Haryadi Baskoro dan Tenaga Ahli Parampara Praja (Pusat Studi Pancasila UGM) Hendro Muhaimin MA dipandu moderator Redaktur SKH Kedaulatan Rakyat (KR) Isnawan.

Sri Margana mengingatkan bahwa yang terpenting dalam melaksanakan Keistimewaan DIY itu adalah mengetahui dan menyadari tujuan awal dari DIY menjadi daerah/provinsi yang istimewa. Pasalnya saat ini DIY masih menjadi provinsi miskin di Indonesia. "Apalah artinya menjadi daerah istimewa jika DIY masih terus menjadi provinsi miskin dan tidak pernah bergerak dari situ. Padahal DIY mendapat sesuatu yang lebih (dana keistimewaan) jika dibanding provinsi lain. Artinya jika keistimewaan ini tidak direspons dengan baik, orang bisa mempertanyakan status Keistimewaan DIY," ujarnya.

Haryadi Baskoro mengatakan, keistimewaan yang dimiliki itu harus mampu menjawab problem-problem di internal DIY sebagaimana tujuan dari UUK. Seperti dalam Pasal 5 UUK, sangat jelas dikatakan bahwa tujuan Keistimewaan DIY adalah untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakatnya dan membangun kebudayaan serta tujuan-tujuan lainnya. "Jadi istimewa itu harus berdampak bagi internal DIY meskipun jika melihat sejarah keistimewaan juga harus berdampak besar bagi bangsa dan negara RI," katanya.

Senada, Hendro Muhaimin menuturkan bahwa yang paling penting dan mendasar dari pelaksanaan keistimewaa itu adalah tujuan dari keistimewaan itu sendiri. Jangan sampai DIY terjebak pada satu urusan yang tetap dan mengulang, atau singkatnya DIY jangan sampai lupa pada tujuan keistimewaan. Oleh karena itu, dalam perjalanan keistimewaan ini, DIY harus mengikutsertakan 3 pilar keistimewaannya yaitu birokrasi, rakyat DIY, Kasultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten Pakualaman.

Menurut Hendro, ketiganya harus menjadi satu pilar, manunggal dan tidak boleh lepas. Ini menjadi syarat utama bagi DIY dalam menyongsong peradaban yang akan datang dan pelaksanaan tujuan keistimewaan yang akan datang. "Itu pilihan bagi kita, ketika kita mau berproses terhadap perjalanan keistimewaan," ujarnya. **(Dev)-f**

KR-Devid Permana

Rembag Kaistimewan bertajuk 'Amanat 5 September 1945'.